

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deliarnoor, N. A., *et al.* (2013). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. In *Unpad Press*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. SAGE.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Friedman, L. M. (1969). *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana.
- Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Lexy, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Universitas Pertahanan.
- Marsetio. (2019). *Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership*. Universitas Pertahanan.
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Octavian, A., & Yulianto, B. A. (2014). *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim*. Universitas Pertahanan.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. In *Encephale*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Timothy D. Hoyt. (2006). *Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq and Israel*. Taylor & Francis E-library.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Tesis

- Indratno, R. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia* (Tesis Magister). Universitas Airlangga.
- Esperansa, R. L. (2020). *Rekonstruksi Hukum Kelembagaan Penegakan Hukum Terhadap Penangan illegal Fishing di Indonesia: Satgas 115* (Issue September).

Jurnal

- A, I. N. P., & Hakim, A. (2017). *Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis*. 1–22.
- Armandos, D., Yusnaldi, & Purwanto. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3(2), 39–56.
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 19–27.
- Esperansa, R. L. (2020). *Rekonstruksi Hukum Kelembagaan Penegakan Hukum Terhadap Penangan illegal Fishing di Indonesia: Satgas 115* (Issue September).
- Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach. *ISPSW Strategies Series: Focus on Defense and International Security*, 49(222), 1–25.
- Hsb, A. M., & Julianthy, E. M. (2018). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 15(2), 1–8.
- Hudayana, A. (2017). Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Larangan Transshipment (Alih Muat) Tangkapan Perikanan Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan Kapal Long Line. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Indratno, R. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut*.
- Isnurhadi, M. R. (2017). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Hubungan Internasional*, X(2), 118–132.
- Iswardhana, M. R. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia : BAKAMLA- US

- Coast Guard. *Dinamika Pertahanan*, 4(1), 1–15.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1569>
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(1), 111–129.
- Muhamad, Nurhadi. (2005). *Tinjauan Teori Otonomi Daerah*.
- Puspoayu, E. S., Yunita, C. V., & Ramadhani, V. C. (2019). Praktik Illegal Transshipment di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 75.
<https://doi.org/10.22146/jmh.35718>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rini, Din, M., & Taqwaddin. (2014). Penilaian Hakim Terhadap Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Illegal Fishing. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 26–38.
- Siwu, R. F. Y. (2019). Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. *Lex Et Societatis*, VII(1), 121–128.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media.
- Supriyadi, Madjid, M. A., & Purwanto. (2020). Security Stakeholder Sinergy in Nipa Island , Batam , Riau Islands. *Keamanan Maritim*, 6(1), 55–78.
- Susilo, A. K., & Suharyo, O. S. (2018). Pengembangan Strategi Keamanan Maritim dalam Menghadapi Ancaman Wilayah Laut sebagai Dampak Perkembangan Kawasan. *Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV, September*, 25–37.
- Wibisono, S. C. (2014). Arkeologi Natuna: Koridor Maritim di Perairan Laut Cina Selatan. *Kalpataru: Majalah Arkeologi*, 23(4), 137–149.
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 110–126.
<http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/35>
- Woolley, G. (2016). *Overview of Nipa Lay-up Anchorage Services*.
www.marinelay-up.com
- Zaenuddin, M., Istardi, D., & Ansori, M. (2012). Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam. *Jurnal Integrasi*, 4(1), 107–110.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1896/1440>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Bab XII

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 102 dan 102A

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan/Keputusan

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 154 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Sambu Bekerjasama Dengan PT. Asinusa Putra Sekawan Untuk Mengembangkan Area Kegiatan Berlabuh Jangka (*Anchorage Area*) dan Alih Muat Barang

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan

Peraturan Kasal Nomor 32/V/2009 tentang Prosedur Tetap Penegakkan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional oleh TNI AL

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

Sumber Elektronik

- Haryadi, M., & Manafe, I. N. (2019). *Tribun*, (2019). *Penyelundupan Barang di Batam Marak, Haris: Perkuat Keamanan dan Kemaritiman*. Tribunnews. Retrieved from: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/30/penyelundupan-barang-di-batam-marak-haris-perkuat-keamanan-dan-kemaritiman> diakses pada 27 Juli 2021
- Keuangan, K. (2013). *Butuh Kerja Sama Semua Pihak Guna Redam Penyelundupan Barang Ilegal*. Retrieved from: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/butuh-kerja-sama-semua-pihak-guna-redam-penyelundupan-barang-ilegal/> diakses pada 26 Juli 2021
- Kumparan. (2020). *Menteri KP Baru Diharapkan Bisa Revisi Aturan Edhy Prabowo*. Retrieved from: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-kp-yang-baru-diharapkan-bisa-revisi-aturan-edhy-prabowo-1uhCk5QzsvE/full> diakses pada 27 Juli 2021
- Nurhadi, M. (2021). *Batam News*. (2021). *Bea Cukai Tangkap Kapal Penyelundup di Barelang*. Batam News. Retrieved from: <https://batam.suara.com/read/2021/08/21/150828/bea-cukai-tangkap-kapal-penyelundup-di-barelang-10810-batang-kayu-teki-diamankan> diakses pada 21 Agustus 2021
- Padjar Iswara. (2020). *Bea Cukai Gagalkan Kapal Penyelundup di Perairan Kepulauan Riau*. Kata Data. Retrieved from: <https://katadata.co.id/padjar/berita/5f93cb17a2bb3/bea-cukai-gagalkan-kapal-penyelundup-di-perairan-kepulauan-riau> diakses pada 27 Juli 2021
- Wiranata, R. (2021). *KSOP Karimun Hadirkan Pulau Nipa CIQP, Beri Kemudahan Penggunaan Jasa Laut*. Batam News. Retrieved from: <https://www.batamnews.co.id/berita-82536-ksop-karimun-hadirkan-pulau-nipa-ciqp-beri-kemudahan-penggunaan-jasa-laut.html> diakses pada 23 November 2021